

Urgensi Pembangunan Rumah Deret di Tamansari Kota Bandung

Rochman Adimiharja*, Meti Mediyastuti Sofyan*, Felita Adlina Arindita*

rochmanadimiharja123@gmail.com, meti.media@umbandung.ac.id,
arindita22@gmail.com

Abstrak

Salah satu isu di permukiman kumuh dan kepadatan penduduk, yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan di Kota Bandung, upaya pemerintah untuk membangun hunian layak melalui proyek Rumah Deret di Tamansari telah memicu konflik sosial. Masyarakat setempat menolak penggusuran dengan klaim bahwa tanah yang digunakan telah mereka huni selama puluhan tahun. Konflik ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder dalam konflik kepentingan pembangunan rumah deret di Tamansari Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik kepentingan pembangunan Rumah Deret di Taman Sari, Kota Bandung, terdapat beberapa kelompok stakeholder dengan peran yang berbeda-beda. Stakeholder utama (primer) dalam konflik ini adalah DPKP3 dan BKM, sementara stakeholder sekunder meliputi PUPR, Polresta/Polsek, Satpol PP, serta berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas. Stakeholder kunci adalah masyarakat yang menentang proyek ini. Begitupun dalam penelitian ini ada temuan baru yaitu Strategi Stakeholder dalam mengatasi konflik kepentingan pembangunan Rumah deret Taman Sari Kota Bandung. Yaitu dengan strategi kolaborasi, kolaborasi stakeholder di sini lebih mengarah kepada interelasi atau bekerjasama dalam menyelesaikan suatu problem yang terjadi yang dilakukan oleh stakeholder primer, stakeholder skunder maupun stalholder kunci. Interaksi antara stakeholder yang pro dan kontra menunjukkan adanya kolaborasi di antara pihak yang mendukung proyek (DPKP3, BKM, PUPR), sementara kelompok yang menentang membentuk koalisi (masyarakat yang kontra, Ormas, komunitas). Temuan baru dari penelitian ini adalah pentingnya strategi kolaborasi antar stakeholder, baik primer, sekunder, maupun kunci, dalam mengatasi konflik kepentingan yang muncul selama pembangunan Rumah Deret di Taman Sari.

Kata Kunci: *Kolaborasi, Konflik, Stakeholder*

Abstract

One of the issues in slum settlements and population density, which affects the quality of the environment and life in the city of Bandung, is the government's efforts to build decent housing through the Row House project in Tamansari has triggered social

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

conflict. The local community resisted the eviction with claims that they had occupied the land they had been using for decades. This conflict involves various stakeholders, including government, society, and non-governmental organizations, each of which has different interests and perspectives. This research aims to analyze stakeholders in the conflict of interest in the construction of row houses in Tamansari, Bandung City. The results of this research show that in the conflict of interest in the construction of Row Houses in Taman Sari, Bandung City, there are several stakeholder groups with different roles. The main (primary) stakeholders in this conflict are DPKP3 and BKM, while secondary stakeholders include PUPR, Polresta/Polsek, Satpol PP, as well as various community organizations (Ormas) and communities. The key stakeholders are the people who oppose this project. Likewise, in this research there are new findings, namely stakeholder strategies in overcoming conflicts of interest in the construction of Taman Sari row houses, Bandung City. Namely with a collaboration strategy, Stakeholder Collaboration here is more directed towards interrelation or working together in resolving a problem that occurs by Primary Stakeholders, Secondary Stakeholders and Key Stakeholders. The interaction between pro and con stakeholders shows collaboration between parties who support the project (DPKP3, BKM, PUPR), while groups who oppose form coalitions (contra communities, mass organizations, communities). A new finding from this research is the importance of collaborative strategies between stakeholders, both primary, secondary and key, in overcoming conflicts of interest that emerged during the construction of Row Houses in Taman Sari.

Keywords: Collaboration, Conflict, Stakeholder

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan masuk deretan lima besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia berdampak terhadap tingginya berbagai problematika yang di hadapi terutama di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu persoalan yang timbul adalah kepadatan penduduk dan pemukiman kumuh, keluhan yang sering disampaikan terkait kota kumuh tersebut di pandang rendahnya kualitas lingkungan yang mana pada hakikatnya lingkungan yang seharusnya dan senantiasa di jaga dari aspek keindahan, kebersihan dan lain sebagainya.

Pembangunan berkelanjutan tentu banyak memperhatikan berbagai aspek untuk jangka panjang begitupun aspek tata ruang yang menjadi suatu penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka usaha dan menjalankan program Kota tanpa kumuh pemerintah kota bandung melakukan berbagai upaya dalam menghindari kekumuhan dan dalam rangka

memanfaatkan lahan yang di anggap berdasarkan 2 haknya milik pemerintah daerah. Kemudian lahan tersebut bisa di manfaatkan sebaik mungkin di tengah-tengah kota yang begitu padat, maka pemerintah Kota Bandung bertujuan dan bermaksud untuk memberikan hunian yang lebih layak untuk warganya dengan membangun Rumah Deret di Pelataran tanah milik pemerintah Kota Bandung. Berbagai rencana yang telah di canangkan oleh pemerintah Kota Bandung dalam proses pelaksanaannya banyak gangguan yang terjadi di lapangan.

Dimulai dari banyaknya penolakan dari warga dalam pembangunan Rumah deret tersebut, di karnakan tanah yang di canangkan untuk Rumah Deret sudah di jadikan hunian jauh-jauh hari bahkan sudah puluhan tahun warga mendirikan bangunan di tanah yang di klaim secara hukum milik pemerintah Kota Bandung. Sehingga terjadi saling klaim antara pemerintah dengan masyarakat. Di dalam penggusuran Taman Sari banyak stakeholder yang pro dan kontra, yang menjadi permasalahan yang di hadapi terjadinya bentrok antara stakeholder yang Pro dan stakeholder yang Kontra. salah satunya yang pro terhadap penggusuran tersebut adalah Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PN GMII), ketua PN GMII penertiban lahan rumah deret Tamansari tersebut dalam rangka pengamanan asset.

Perencanaan rumah susun Tamansari di Kota Bandung sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 2007, namun kembali di canangkan ketika kepemimpinan bapak Ridwan Kamil yang menjabat sebagai wali kota Bandung pada tahun 2013. Kementrian PUPR pun sudah menjadikan proyek prioritas nasional. Selama itu sudah banyak dilakukan negosiasi yang dilakukan antara warga dan pemkot. Namun pada kenyataannya masih belum menemui titik terang antara kedua belah pihak.

Salah satu kasus kebijakan yang di tentang oleh masyarakat adalah Pada 12 Desember 2019 lalu di jalan Taman Sari Kota Bandung tepatnya di Rw 11 yang mana terjadi penggusuran oleh pemerintah Kota Bandung, kala itu

eksekusi penggusuran rumah berlangsung ricuh dan ada indikasi aparat yang diduga melakukan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penggusuran merupakan pengusiran paksa atau merobohkan bangunan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan pemerintah selaku pemangku kebijakan terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk hunian baru atau usaha, akan tetapi komisi Hak Asasi Manusi (HAM) PBB No 77 pada tahun 1993 telah menegaskan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat.

Dalam setiap bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak selamanya selalu mendapatkan respon positif dari berbagai lapisan masyarakat, kelompok maupun golongan, pada fenomenanya selalu ada saja kelompok atau berbagai lapisan masyarakat yang tidak terpuaskan oleh kebijakan pemerintah, sebab idealnya advokasi bertujuan untuk merubah kebijakan yang buruk menjadi baik atau memperjuangkan pelaksanaan kebijakan yang dikehendaki (Rahardian dan Zarkasi 2019), dan itupun yang dilakukan oleh warga di Tamansari kota Bandung. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu untuk menganalisis Stakeholder dalam konflik kepentingan pembangunan Rumah Deret Di Tamansari Kota Bandung.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi Publik

Pemahaman administrasi publik yang memperlihatkan keterkaitan antara 3 (tiga) lembaga negara seperti Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, serta sampai pada kemampuan dari administrasi publik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini adalah menurut Nigro (1977:5), yaitu :

Public Administration : is cooperative group effort in a public setting covers all three branches of-executive, legislative and judicial and interrelationship has an important role in the formulation if public policy, and is thatpart of the pilitical process is different in significant ways from private administration is closely associated with numerous private group and individual in providing services to the community.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa, Public Administration, meliputi: 1) kerjasama kelompok dalam kerangka pencapaian tujuan/settingan publik, meliputi tiga cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantaranya; 2) memiliki peran penting dalam formulasi kebijakan publik, 3) merupakan bagian dari proses politik; 4) bisa dibedakan secara jelas dengan administrasi swasta; 5) memiliki keterkaitan dengan kelompok privat dan individu dalam menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi publik memiliki *output* untuk pencapaian tujuan nasional dengan pelaksanaannya adalah para aparatur negara ditunjang oleh berbagai unsur pendukung dari negara tersebut, seperti pernyataan spesifik. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2002:1) menyatakan bahwa administrasi publik, yaitu:

“Keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan Nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti dalam UUD1945.”

2. Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (2018), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan bermacam metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisisnya adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan,

tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Dalam metode analisis versi William Dunn terdapat lima (5) prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu :

1. Definisi. Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi. Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika melakukan sesuatu.
3. Preskripsi. Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang.
4. Deskripsi. Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi. Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Dunn (2004:608) menjelaskan bahwa istilah evaluasi sering dipadankan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), lebih lanjut, evaluasi karenanya adalah sebuah produksi informasi tentang nilai atau manfaat hasil dari kebijakan. Menurut Wahab (2011:176) evaluasi sebagai praktik memiliki kompleksitas sosio-politik, yang sering kali tidak hanya berurusan dengan permasalahan teknis penilaian, seperti apa yang ingin dan seharusnya dicapai dengan apa yang telah atau senyatanya dicapai.

3. Stakeholders

Analisis stakeholder adalah proses yang dimana mengidentifikasi baik perorangan atau kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi

oleh suatu tindakan yang akan dilakukan atau dikelompokkan dengan dampak dari tindakan yang dilakukan. Menurut Bryson (2004; 23-4) dalam bukunya analisis stakeholder juga dapat disebut lebih penting dari sebelumnya karena sifat dunia yang semakin saling keterkaitan. Pilihlah masalah publik, pembangunan ekonomi, kinerja Pendidikan yang buruk, pengelolaan sumber daya alam, pemanasan global, terorisme yang sangat jelas permasalahannya mencangkup banyak orang, kelompok dan organisasi. Tidak ada yang bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut dan sebaliknya banyak individu, kelompok, dan atau organisasi yang terlibat, atau terpengaruh dan memiliki sebagian tanggung jawab untuk bertindak. Mencari tau apa yang menjadi masalahnya dan solusi apa yang mungkin bekerja sebenarnya itu adalah bagian dari masalah (Bryson and Crosby, 1992 , Bardach: 1998)

4. Rumah Deret

Rumah deret merupakan tatacara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, rumah deret atau hunian gandeng banyak merupakan beberapa tempat kediaman yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. Rumah deret itu sendiri merupakan rumah tunggal yang disusun secara berjajar tanpa ada jarak atau sisa lahan kosong , hanya ada dinding pemisahannya sebagai batas antara rumah satu dengan rumah sebelahnya.

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Jhon Creswell dalam bukunya penelitian kualitatif merupakan metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Penelitian ini dilakukan sejak 11 Januari – 2 April 2023 dengan Subjek dari penelitian ini adalah para

stakeholder yang terlibat dan terdampak dalam pengurusan Rumah Deret Tamansari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil

Urgensi dan Esensi Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung

Dalam rangka Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sudah dipayungi dengan aturan baku. Selain UU No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan ada juga PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sangat mengatur tentang bagaimana melaksanakan peningkatan kualitas dan/atau meniadakan kawasan kumuh. Selain itu, peraturan lain yang bisa dijadikan acuan dalam pengimplementasian penataan kawasan kumuh adalah Permen PUPR No. 2 tahun 2016. "Artinya, semua dasar atau acuan yang mengawal kegiatan penanganan kumuh agar berjalan lancar, sudah ada. Jadi tidak ada lagi pelaksanaan yang menyimpang. Kota Ku sudah menjadi program nasional yang disebut sebagai 100-0-100," kawasan kumuh per tahun 2014, kawasan kumuh mencapai 38.431 Ha. Masalahnya, timbulnya kawasan kumuh selalu diikuti kawasan kumuh baru. Dengan cita-cita meniadakan kekumuhan ini, banyak hal yang perlu diperhatikan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) diharapkan berpartisipasi dalam hal ini adalah karena diketahui bahwa di dalam kawasan kumuh, sekitar 23.000 Ha diantaranya terdapat kelembagaan yang sudah dibentuk sejak tahun 1999. Kelembagaan itu adalah BKM. BKM yang peran strategisnya dulu menangani kemiskinan, sekarang ditambah juga menangani kumuh maka jadi sempurna. BKM menjadi bangun infrastruktur pencegahan dan penanganan

kumuh, ditambah penguatan terhadap Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. Dalam hal ini, peran BKM memang jadi semakin berat. Jika dulu BKM mengelola pinjaman dana bergulir, sekarang BKM diharapkan mampu mengembangkan ekonomi lokal yang bias meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Maka Pemerintah Kota Bandung mulai merealisasikan program Kotaku (kota tanpa kumuh). Program tersebut adalah program kerjasama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bermaksud untuk membangun sistem terpadu bagi penanganan kumuh. "Ini adalah salah satu bentuk upaya rekonsiliasi Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen untuk kepentingan bersama." jelas Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial Usai meletakkan Batu Pertama pembangunan Kotaku di Kawasan RW 09 kelurahan pasirbiru Kecamatan Cibiru, (Tribun Jabar 13/10/17).

Pemerintah Kota Bandung berharap rekonsiliasi kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh elemen masyarakat terus berjalan mulus, karena hal tersebut menjadi syarat percepatan pembangunan yang merata. Partisipasi masyarakat selalu dikedepankan, pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya. Program Kotaku yang dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) direalisasikan untuk bantuan dana infrastruktur Yang Kondisi sarana dan prasarannya tidak memenuhi syarat Diantaranya, bangunan Jalan Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Perencanaan rumah susun Tamansari di Kota Bandung sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 2007, namun kembali di canangkan ketika kepemimpinan bapak Ridwan Kamil yang menjabat sebagai wali kota Bandung pada tahun 2013. Kementrian PUPR pun sudah menjadikan proyek prioritas nasional. Selama itu sudah banyak dilakukan negosiasi yang dilakukan antara warga dan pemkot. Namun pada kenyataannya masih belum menemui titik terang antara kedua belah pihak banyak opsi yang di tawarkan terhadap warga Rw 11 tersebut. Maka dari itu hal tersebut menjadi krusial karena masing masing pihak baik dari pemerintah kota maupun masyarakat taman sari yang bersikeras bahwasanya mereka yang memiliki akan hak tanah.

Pemerintah Kota Bandung mengatakan lahan di Tamansari tersebut merupakan milik pemerintah kota Bandung, namun beberapa tahun warga Tamansari menyewa lahan tersebut, pemkot Bandung berencana untuk membangun rumah deret di area lahan yang tengah dilakukan pembongkaran tersebut. Pemkot Bandung lewat lidang sektor dalam proses implementasi ini yaitu DPKP3 sebagai bidang yang menjalankan Program Kotaku yang senantiasa memobaili situasi dan kondisi dilapangan. Pihak Pemkot juga mengklaim bahwa dalam gugatan yang dilayangkan masyarakat RW 11 di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh pemkot Bandung, putusan itu sudah inkrah sehingga SK kepala DPKP3 nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari yang menjadi dasar penggusuran sah secara Hukum.

Pemerintah sendiri tidak memungkiri sebagian besar warga RW11 ada yang bersedia di relokasi ke Rusunawa Rancacili untuk selanjutnya menunggu dibangunnya rumah deret. Sedangkan sebagian warga ada yang memilih bertahan dikawasan tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian hukum. Banyak proses yang terlewati dan Konflik sosial tak dapat terhindarkan,

penolakan marak disuarakan oleh para warga kota Bandung dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah terkait tanah yang sedang di huni oleh warga yang kemudian harus pindah dikarenakan mau di bangun Rumah Susun dan di Klaim tanah tersebut milik pemerintah Kota Bandung. Dari beberapa titik konflik atau titik penggusuran yang terjadi pada kawasan permukiman kampung di Kota selalu menyisakan cerita yang mengesankan mengenai warga yang berusaha bertahan dan menolak penggusuran. Selain berbekal argumentasi mengenai hal yang praktis, seperti terancamnya kehidupan sosial mereka, tersingkirnya pekerjaan yang mereka punya, begitupun pendidikan bagi anak-anak yang menjadi sulit. Warga juga memiliki sense of belonging terhadap lingkungannya, yang tentunya telah ditempati sejak lama.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya stakeholder yang Pro dan kontra terhadap pembangunan rumah deret tersebut. Sehingga pembangunannya sampai saat ini masih mengambang dikarenakan ada beberapa stakeholder yang peneliti temukan masih belum bisa di bawa duduk bersama dan masih bersitegang atas argumentasi yang di kedepankannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi teoritis yang telah dilakukan dalam analisis stakeholder dalam konflik kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung, maka dapat di tarik kesimpulan dimana identifikasi stakeholder Utama (Primer) dalam Konflik Kepentingan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung adalah DPKP3, BKM, Sedangkan Stakeholder Skunder adalah PUPR, Polresta/ Polsek, Satlpol PP, Ormas dan Komunitas. Sedang Stakeholder kunci adalah dalam konflik kepentingan pembangunan Rumah deret Taman Sari Kota Bandung ini adalah sebagai Masyarakat yang Kontra. Kategori Stakeholder dalam analisis stakeholder dalam konflik

kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung, yaitu stakeholder yang masuk Kategori Key Players (Pemain kunci) adalah DPKP3, BKM, Masyarakat yang Kontra, Stakeholder yang masuk dalam katagori context setters dalam analisis stakeholder dalam konflik kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung yaitu Kelurahan, RW 11, dan Para Rt, Walhi Jabar, Stakeholder yang masuk dalam katagori subjects dalam analisis stakeholder dalam konflik kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung Ormas dan Komunitas yang memberikan pengaruh kepada Warga yang Kontra, dan Stakeholder yang masuk dalam kategori crowd dalam analisis stakeholder dalam konflik kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung Polresta, Polsek, Satpol PP Kota Bandung.

Interelasi stakeholder dalam analisis stakeholder dalam konflik kepentingan Pembangunan Rumah Deret di Taman Sari Kota Bandung. Interelasi Stakeholder yang Pro dan Kontra, dimana Stakeholder yang Pro membangun suatu Kerjasama atau Kolaborasi (DPKP3, BKM, PUPR), begitupun stakeholder yang kontra membangun koalisi (Masyarakat Yang Kontra, Ormas, Komunitas). Kolaborasi Stakeholder disini lebih mengarah kepada interelasi atau bekerjasama dalam menyelesaikan suatau problem yang terjadi yang dilakukan oleh Stakeholder Primer, Stakeholder Skunder Maupun Stakeholder Kunci.

Selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis menyampaikan

saran-saran sebagai berikut:

1. Harus di lakukan strategi kolaborasi stakeholder dalam mengatasi konflik kepentingan dalam pembangunan Rumah Deret Taman Sari Kota Bandung, Supaya problem yang ada cepat terselesaikan.

2. Ada indikasi pengaruh dari stakeholder luar yang tidak ada korelasinya mencoba masuk dan memberikan pengaruh kepada salah satu warga yang sampai hari ini masih Kekeh dengan pendapatnya.
3. Ada indikasi kepentingan yaitu mengejar materi atau bayaran dari warga yang notabennya membawa basis masa dengan dalih membantu mengadvokasi warga yang Kontra.
4. Ada indikasi dari suatu kelompok yang tidak suka terhadap pemerintah, sehingga melancarkan aksinya lewat pengaruh terhadap warga yang tidak setuju terhadap pembangunan Rumah deret Taman Sari Kota Bandung.

Daftar Rujukan:

- Abbas R. 2005. *Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakholders Taman Nasional Gunung Rinjani*. IPB Press.
- Agranoff, Robert, dan Michal, Mc Guire. 2003. *Collaborative public management new strategies for local government*. Washington, D.C. Georgetown Universiti Press.
- Gordon. G. George & W.M. Cummincs. 2003. *Managing Management Climate*. Lexington, Mass : Bina Rupa Aksara.
- H. George Frederickson. 1994. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta PT. Pustaka LP3s
- Hicks, Herbert & Ray Gullet. 1996. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*, terjemahan G Kartasaputra. Jakarta : Dunia Aksara
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam, 2009. *Perilaku Organisasi* : Sinar Baru.

- Kerlinger, Fred.N. 1998 *Azas-azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Linden, Russel M. 2002. *Working Across Boundaries*. Jossey A Wiley Imprant.
- Mustopadidjadja. 2009. *Kebijakan Administrasi Negara*. Jakarta : LAN-RI
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nigro, Felix A. And Nigro, Lioyd G. 1977. *Modern Public Administrastion*. California : Harper and Row.
- Nusution, S. 1987. *Metode Research*. Bandung : Jemars
- Putra, Fadillah, 2010. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 94
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tadjudin, Djuhendi. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustaka Latin.
- Thoha, Miftah. 2012. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : CV Rajawali.